



Determinan Kemandirian Keuangan Daerah

Andini Marselina, Eva Herianti

[Universitas Muhammadiyah Jakarta](http://www.umj.ac.id)

andinimarselina@gmail.com

Informasi Artikel

ABSTRACT

Terima 14/12/2021

Revisi 13/01/2022

Disetujui 21/01/2022

DOI:

[10.24853/jago.2.2.110-118](https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118)

Keywords:

*Capital Expenditure,
Local Tax, General
Allocation Fund,
Regional Finance
Independence*

The dependency level of regional governments' financial on central government is quite high, directing this study to further analyze its determinants. This study employs quantitative method with secondary data from the realization reports of regional expenditure revenues in the form of balance sheets and governmental financial reports. 156 reports during 2016-2018 from 56 regencies and cities on the island of Kalimantan are chosen with purposive sampling. The results show that capital expenditures, regional taxes and general allocation funds simultaneously have significant effect on regional government's financial independence. Partially, capital expenditures and regional taxes also have significant effect on regional government's financial independence, while general allocation fund has insignificant effect on regional government's financial independence.

Kata Kunci:

Belanja Modal, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Kemandirian Keuangan Daerah

ABSTRAK

Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang cukup besar mengarahkan penelitian ini untuk menganalisis lebih jauh determinan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder yang berasal dari laporan neraca dan laporan realisasi pendapatan belanja daerah. Populasi penelitian ini ialah 56 Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan dengan *purposive sampling* sebagai dasar penentuan sampel sehingga menghasilkan 156 sampel pada tahun 2016-2018. Hasil penelitian mendapati bahwa belanja modal, pajak daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, belanja modal dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud dari kemampuan pemerintah daerah mengatur dan mengurus rumah tangga secara mandiri (Viphindratin & Cahyo, 2016). Hal ini terwujud apabila pemerintah daerah hanya sedikit menggunakan dana dari pemerintah pusat sehingga dana terbesar yang digunakan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lestari et al., 2016). Hal ini mendorong pemerintah daerah, secara bertahap, berusaha mandiri dan melepaskan ketergantungannya pada pemerintah pusat (Sanga et al., 2018).

Pemerintah daerah berusaha mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat agar diakui mempunyai tingkat kemandirian keuangan yang tinggi. Gambaran mengenai kemandirian keuangan daerah, yaitu PAD dibandingkan total pendapatan, yang didapatkan secara mandiri maupun dari pemerintah pusat (Halim & Kusufi, 2012) terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Rata-Rata Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Nasional Tahun 2016-2018

Wilayah Kepulauan	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%)			
	Rata-rata 2016	2017	2018	Rata-Rata 2017 dan 2018
Jawa	23,00	34,80	36,10	35,45
Bali dan Nusa Tenggara	23,00	22,60	25,10	23,85
Kalimantan	23,00	17,60	18,30	17,95
Sumatera	23,00	16,50	18,90	17,70
Sulawesi	23,00	14,20	15,30	14,75
Papua dan Maluku	23,00	6,00	6,00	6,00

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dicapai oleh wilayah Jawa dan diikuti oleh wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi ke 3 (tiga) dengan rata-rata rasio tahun 2017-2018 sebesar 17,95% dari total pendapatan daerah. Data tersebut menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah hanya didukung PAD sebesar 17,95%. Khusus tahun 2018, tingkat kemandirian keuangan daerah wilayah Kalimantan memiliki peringkat keempat dengan rasio kemandirian keuangan sebesar 18.30%.

Salah satu faktor yang mampu memberikan pengaruh pada kemandirian keuangan daerah ialah belanja modal. Provinsi Kalimantan Utara memiliki tingkat belanja modal tertinggi se-Indonesia di tahun 2017-2018, sedangkan tingkat belanja modal tertinggi di tahun 2016 yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, tingkat belanja modal terendah tahun 2018 ialah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 7,5% dari total belanja daerah. Selain Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah juga memiliki tingkat belanja modal tertinggi kelima se-Indonesia (APBD, 2017-2018).

Pendapatan daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan belanja modal agar pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum menjadi lebih baik dan pelayanan terhadap masyarakat meningkat (Antari & Sedana, 2018). Namun realisasinya tidak semua daerah mampu menggunakan pendapatan daerah untuk mendanai kegiatan belanja modal. Contohnya pada 56 Kabupaten/Kota di Kalimantan, rasio belanja modal terendah adalah Kabupaten Barito Timur sebesar 13,08%, realisasi pendapatan daerah juga masih rendah sehingga sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan belanja modal menjadi terbatas.

Selain belanja modal, pajak daerah juga dinilai memberikan pengaruh pada kemandirian keuangan daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah mampu memberi peningkatan pada kemandirian keuangan daerah (Novalistia, 2016). Sebab, pajak daerah merupakan sumber PAD terbesar. Sedangkan PAD besar menunjukkan kemandirian daerah karena dapat membiayai kebutuhan pemerintah daerah sendiri dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat (Andriani & Wahid, 2018). Secara nasional

penerimaan PAD terbesar adalah pajak daerah tahun 2018 sebesar 68,50% dari total pendapatan asli daerah, namun masih adanya rasio pajak daerah yang rendah yang diperoleh Kota Mahakam Ulu yaitu hanya sebesar 0,07% pada tahun 2018, lemahnya pengawasan pada pepungutan pajak membuat penerimaan PAD menjadi rendah (Ulandari & Purbadharmaja, 2019).

Selanjutnya, dana alokasi umum juga dinilai memberikan pengaruh pada kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan data provinsi, Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan dana perimbangan terbesar keempat dari seluruh provinsi di Indonesia. Secara Kabupaten dan Kota di Provinsi Pulau Kalimantan, Kabupaten Ketapang menjadi kabupaten dengan penerimaan dana alokasi umum terbesar yaitu sebesar Rp.1.12 triliun merupakan 71,22% dari total dana perimbangan, jumlah ini melebihi PAD yang diperoleh Kabupaten Ketapang yang pada kenyataannya memperlihatkan bahwa pemerintah daerah belum seutuhnya mampu melepaskan diri dari pemerintah pusat dalam mengelola kegiatan dan pembangunan daerah (Ariani & Putri, 2016).

Penelitian kemandirian keuangan daerah umumnya menggunakan populasi pada Provinsi Kepulauan Jawa dan Bali. Ariani & Putri (2016), Darwis (2015) dan Novitasari & Novitasari (2019) mendapati belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Darmayasa & Bagiada (2013), Nggilu et al. (2016), Sunarto & Sunyoto (2016), Novalistia (2016), Susianti et al. (2017), Febriyanti & Faris (2019) dan Novitasari & Novitasari (2019) mendapati pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Nindita & Rahayu (2018), Sanga et al. (2018) dan Marizka (2013) mendapati dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kadafi & Putra (2013) yang melakukan penelitian dengan studi empiris hanya pada Pemerintah Daerah dengan objek penelitian dilakukan di Kota Samarinda (Kalimantan Timur). Padahal berdasarkan ringkasan APBN Tahun 2018, wilayah Kalimantan memiliki rata-rata kemandirian keuangan daerah terbesar ketiga di Indonesia. Kalimantan dianggap mampu menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan kemandirian keuangan berdasarkan belanja modal, pajak daerah, dan dana alokasi umum disertai keterbaruan objek penelitian yang dipilih adalah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan.

KAJIAN LITERATUR

Teori Desentralisasi

Teori Desentralisasi di sini merupakan wewenang yang didapatkan pemerintah daerah dari pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan sendiri untuk urusan pemerintahannya (Novindriastuti & Purnomowati, 2020). Dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dapat menentukan sendiri keputusan yang efektif dalam rangka menjadikan daerahnya lebih maju (Olivia, 2020). Teori desentralisasi, pertama kali disampaikan Koesoemahatmadja (1979) dalam Hardini (2016), menjelaskan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Desentralisasi dipergunakan untuk mengurangi wewenang pemerintah pusat terhadap daerah yang mana semua urusan daerah tidak bisa langsung diselesaikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai tingkat

administrasi yang paling bawah dapat mengambil alih urusan tersebut. Teori desentralisasi terkait keuangan juga mampu membentuk kemandirian keuangan daerah. Halim & Kusufi (2014) mendefinisikan kemandirian keuangan daerah yaitu kapabilitas pemerintah daerah mendanai secara mandiri aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat atas pajak yang diperoleh sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah.

HIPOTESIS

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Darwis (2015) mendefinisikan belanja modal sebagai aktivitas pendanaan untuk pembangunan, peningkatan, pengadaan serta kegiatan non fisik guna mengakomodasi permodalan. Halim (2016) menyatakan belanja modal mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah karena belanja modal berdampak *multiplier effect* untuk perekonomian daerah. Tingginya belanja modal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan fasilitas yang telah diberikan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat berupa pembayaran pajak dan retribusi dapat meningkatkan perolehan PAD sehingga mendorong daerah tersebut menjadi daerah mandiri. Daya serap belanja modal dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Novitasari & Novitasari, 2018). Penelitian Ariani & Putri (2016), Darwis (2015) dan Novitasari & Novitasari (2019) mendapati belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H₁: Belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Susianti et al. (2017) menginterpretasikan pajak daerah sebagai iuran wajib yang dilaksanakan perseorangan atau badan kepada daerah otonom yang bersifat wajib, diatur oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah demi mencapai kesejahteraan rakyat. Pungutan pajak daerah yang tinggi memiliki arti bahwa pemasukan kas daerah semakin meningkat, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar, terutama pemerintah pusat (Sunarto & Sunyoto, 2016). Jumlah penerimaan pajak tentu mempengaruhi kapasitas anggaran negara untuk mendanai pengeluaran, baik dialokasikan sebagai dana pembangunan maupun anggaran rutin (Febriyanti & Faris, 2019). Penelitian Darmayasa & Bagiada (2013), Nggilu et al. (2016), Sunarto & Sunyoto (2016), Novalistia (2016), Susianti et al. (2017), Febriyanti & Faris (2019) dan Novitasari & Novitasari (2019) mendapati pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H₂: Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2016) mengartikan dana alokasi umum sebagai pengalihan dana dimana pemerintah daerah memiliki keleluasan dalam penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Ariani & Putri (2016) mendefinisikan dana alokasi umum sebagai dana yang diserahkan untuk dapat mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Pemerintah yang mengelola dana alokasi umum secara efektif dan efisien dalam upaya

peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini juga mampu meningkatkan produktivitas dari sektor industri yang akan berpengaruh pada meningkatnya perolehan pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan daerah yang meningkat dan semakin besar dapat diartikan bahwa daerah tersebut telah memenuhi kriteria untuk dikatakan mandiri dari sisi keuangan (Sari, 2015). Penelitian Nindita & Rahayu (2018), Sanga et al. (2018) dan Marizka (2013) mendapati dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

H₃: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian berupa kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari data neraca dan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah. 56 Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan menjadi populasi penelitian. Periode pengamatan adalah tiga tahun (2016-2018). Total sampel secara keseluruhan adalah 168. Adapun operasional variabel penelitian disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemandirian Keuangan Daerah = $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi PAD}}$ Sumber: Ariani & Putri (2016)
Belanja Modal (X ₁)	Belanja Modal = $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}}$ Sumber: Darwis (2015)
Pajak Daerah (X ₂)	Pajak Daerah = $\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$ Sumber: Nggilu et al. (2016)
Dana Alokasi Umum (X ₃)	Dana Alokasi Umum = $\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$ Sumber: Amalia & Haryanto (2019)

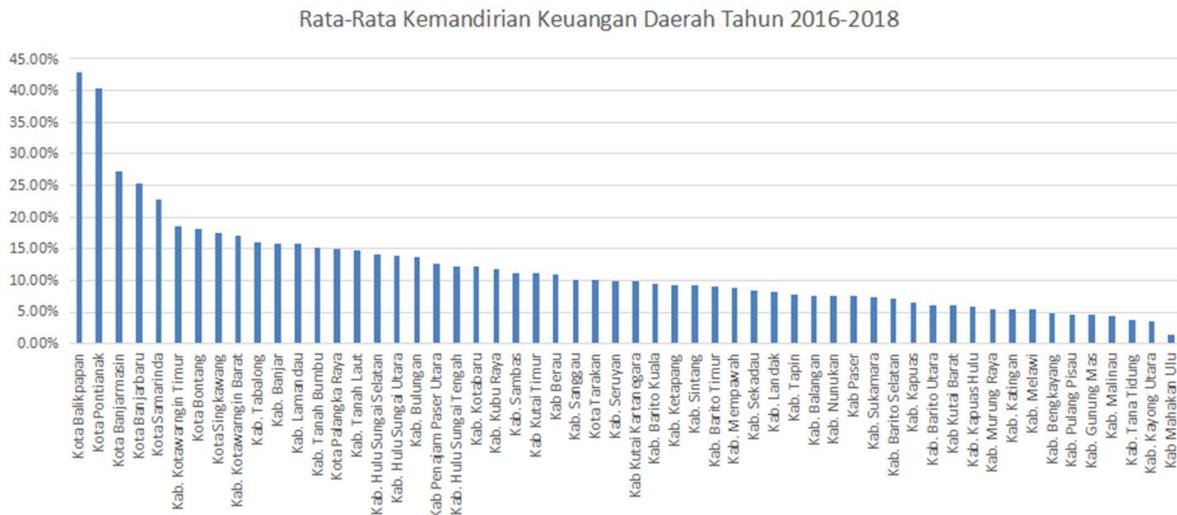
Analisis regresi data panel merupakan analisis data yang diterapkan dalam penelitian. Alat bantu statistik berupa program *E-views* 10. Analisis data terdiri dari deskripsi data penelitian, analisis pemilihan model regresi data panel, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Gambar 1

Nilai Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan



Berdasarkan Gambar 1, sepanjang tahun 2016-2018, nilai rata-rata tertinggi kemandirian keuangan daerah dimiliki Kota Balikpapan dengan nilai sebesar 42.82%. Dari tiga tahun tersebut tingkat kemandirian keuangan tertinggi adalah 48.53% terjadi pada tahun 2017. Tingginya tingkat kemandirian keuangan di tahun 2017 ini dipengaruhi dengan adanya sumber daya manusia yang banyak yaitu Kota Balikpapan merupakan kota paling padat penduduk di Kalimantan Timur dengan setiap 1 km² dihuni oleh 1,242 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018).

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui tiga kali pengujian, yaitu Uji Chow yang menghasilkan *fixed effect*, serta Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier (LM) yang menghasilkan *random effect*. Hasil pengujian dari ketiga metode yang dipilih adalah *random effect*.

Koefisien determinasi

Nilai koefisien determinasi adalah 0,612760 atau 61,28%, artinya variabel kemandirian keuangan daerah dipengaruhi variabel belanja modal, pajak daerah dan dana alokasi umum sebesar 61.28%, dan sisanya 38.72% dijelaskan faktor lain.

Tabel 3.

Uji t Statistik

Variabel Independen	Prob.	H _a	Tingkat Alpha	Kesimpulan
Belanja Modal	0,0281	diterima	0,05	Berpengaruh
Pajak Daerah	00.000	diterima	0,05	Berpengaruh
Dana Alokasi Umum	0,5593	ditolak	0,05	Tidak Berpengaruh

HASIL UJI HIPOTESIS

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 3. modal kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Nindita & Rahayu (2018) menjelaskan belanja modal tidak selalu akan berdampak pada kenaikan kemandirian keuangan daerah, namun bisa juga menurunkannya karena pengeluaran yang lebih besar untuk belanja modal dibandingkan dana alokasi umum dan diindikasikan banyak aset tetap yang terbengkalai tidak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Kebijakan belanja modal ini tentu sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah atas keuangan yang di kelola secara mandiri ini mewujudkan teori desentralisasi. Penelitian Nindita & Rahayu (2018) dan Novitasari & Novitasari (2019) menyatakan daerah yang tidak mandiri memiliki belanja modal yang lebih besar dibiayai oleh dana alokasi umum. Belanja modal yang semakin meningkat berdampak pada penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil ini mengonfirmasi temuan Ariana & Putri (2016), Darwis (2015) dan Novitasari & Novitasari (2019).

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 3. pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penerimaan pajak daerah yang meningkat tentu akan meningkatkan pendapatan daerah yang membentuk kemandirian pemerintah daerah dalam memenuhi pengeluaran atas setiap kebutuhan yang dimiliki dengan tidak melibatkan pemerintah pusat (Sunarto & Sunyoto, 2016). Perolehan pajak daerah juga menentukan kemampuan anggaran negara dalam mendanai pengeluaran Negara, baik untuk tujuan belanja modal maupun pengeluaran rutin (Febriyanti & Faris, 2019). Hasil ini mengonfirmasi temuan Darmayasa & Bagiada (2013), Nggilu et al. (2016), Sunarto & Sunyoto (2016), Novalistia (2016), Susianti et al. (2017), Febriyanti & Faris (2019) dan Novitasari & Novitasari (2019).

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 3. dana alokasi umum berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini dapat menjelaskan bahwa tingginya perolehan dana alokasi umum suatu daerah belum tentu dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Dana alokasi umum yang tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah menjadi suatu kelemahan dari pengelolaan keuangan daerah, karena dana alokasi tersebut lebih banyak di gunakan untuk belanja daerah yang sifatnya konsumtif tidak digunakan untuk mengembangkan potensi daerah yang lebih produktif (Sanga et al., 2018). Kontribusi dana alokasi umum ini berarti tidak digunakan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hasil ini mengonfirmasi temuan Nindita & Rahayu (2018), Sanga et al. (2018) dan Marizka (2013).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah; 2) pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah; dan 3) dana alokasi umum berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Implikasi penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam mengevaluasi tingkat kemandirian

keuangan suatu daerah, sebagai inisiatif agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara menggali lebih dalam kemampuan daerah yang dimiliki sehingga PAD yang di peroleh lebih besar, dan dapat meningkatkan peran pemerintah daerah untuk dapat lebih memperhatikan kemandirian keuangan daerah masing-masing agar daerahnya dapat dinilai secara mandiri mendanai kegiatan pemerintahannya.

Keterbatasan penelitian ini terkait cakupan pemerintah daerah yang menjadi populasi penelitian masih terbatas pada pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan, sehingga belum cukup mewakili tingkat kemandirian keuangan daerah untuk seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendapati belanja modal, pajak daerah dan dana alokasi umum hanya mampu memberi pengaruh pada kemandirian keuangan daerah sebesar 61.28% dan sisanya sebesar 38.72% dipengaruhi faktor lain. Saran diberikan kepada peneliti selanjutnya agar mampu menambah variabel lain seperti dana alokasi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi*, 13(1).
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(2).
- Ariani, R. K., & Putri, A. G. (2016). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2015. BPS Jawa Barat.
- Darmayasa, N.I, & Bagiada, M.I. (2013). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Bagi Hasil Pajak Sebagai Penopang Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 9(2), 121-129.
- Darwis, E. R. T. (2015). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1 – 23.
- Febriayanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2), 162-175.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M.S. (2014). *Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akutansi keuangan daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardini, H. K. (2016). Efektivitas Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu). *Jurnal Transformative*, 2(2), 108-127.
- Lestari, A., Dali, N. & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progren Ekonomi Pembangunan*. 2(1), 44-55.

- Marizka, R. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011). *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 2 – 22.
- Nindita, N. L. & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Serta Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wacana Kinerja*, 2(1), 12 – 19.
- Novalistia, L. R. (2016). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*. 2(2), 1 – 25.
- Novitasari, M. & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174 – 186.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 623-635.
- Sari, I. (2015). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). Universitas PGRI Yogyakarta. 1 – 12.
- Sunarto & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Dharma Ekonomi*, 23(43), 13 – 22.
- Sanga, K.P., Hermanto, S.B., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 19(2), 67 – 81.
- Susianti, D., Murhabban, & Zulkarnaini. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Survei di Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 3(1), 15-27.
- Ulandari, I. A. N., & Purbadharmaja, I. B. P. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(1), 1 – 31.
- Viphrindratin, S., & Cahyo, H. (2016). Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province. *Rev. Integr. Bus. Econ. Res*, 5(2), 272-285.
- Olivia, D. (2020). Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam Kerangka Penyelenggaraan Desentralisasi. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 85-93.